



Sekda Pastikan Anggaran Terdampak Efisiensi

WATES (KR) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono MSi menegaskan, anggaran untuk pelantikan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) terpilih tidak terdampak kebijakan efisiensi.

"Anggaran pelantikan tetap seperti semula, tidak ada pengurangan," tegasnya, Rabu (12/2).

Diungkapkan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pekab) Kulonprogo terus mempersiapkan kebutuhan pelantikan Bupati dan Wabup terpilih yang rencananya dilakukan pada 20 Februari mendatang. Persiapan tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Seperti diketahui, para kepala daerah (bupati-wabup dan walikota-wakil walikota) terpilih akan dilantik langsung Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara. Setelah pelantikan, para kepala daerah hasil Pilkada 2024 tersebut harus menjalani *retret* selama sepekan di Magelang, Jawa Tengah.

Lebih lanjut Sekda Triyono mengungkapkan, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan atribut pelantikan. Termasuk akomodasi bagi kepala daerah dan pendampingnya. Hingga kini belum diketahui apakah pelantikan akan dilakukan Jakarta atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan.

Rambung *retret*, pekab setempat masih harus mempersiapkan anggaran untuk kegiatan serah terima jabatan (Sertijab), rapat paripurna (Rapur) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, hingga acara pisah sambut. Saat ini pekab masih mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan tersebut. "Kalaupun ada pengurangan anggaran, mungkin di acara pisah sambutnya," tutur sekda.

Tentang anggaran untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati bisa menggunakan pos perjalanan dinas dari APBD Kulonprogo. Tapi untuk penggunaannya memerlukan persetujuan dari Pemda DIY.

"Kalau tidak diizinkan maka nanti menggunakan Belanja Operasional untuk membiayai seluruh kegiatan pelantikan. Meski begitu penggunaannya tetap harus ada pertanggungjawaban oleh Penjabat Bupati," ungkap Triyono.

Saat *retret* di Magelang hanya diikuti Bupati terpilih didampingi tim dari pekab. Sedangkan Wabup akan langsung menjalankan tugasnya setelah dilantik.

Untuk prosesi sertijab dan Rapur DPRD tidak masalah dilaksanakan masa puasa dan tanpa jamuan. Tapi yang berpotensi terkendala adalah acara pisah sambut, karena biasanya malam dan cukup lama, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi puasa. **(Rul)-f**